

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai Politik Eksploitasi Tubuh Perempuan Studi Tarik Menarik Kepentingan dalam Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya maka peneliti dapat menyimpulkan :

- Kepentingan yang muncul saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak terbagi menjadi dua, yakni pihak yang setuju dan tidak setuju. Pihak yang setuju dengan penutupan lokalisasi adalah Pemerintah Kota Surabaya, Camat Sawahan, Lurah Putat Jaya, dan ormas Islam di Jawa Timur. Kepentingan ini sebagai artikulasi dari menurunkan angka prostitusi, meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat, serta menghilangkan penyakit sosial masyarakat yang selama ini ditimbulkan dengan adanya lokalisasi.

Pihak yang tidak setuju dengan penutupan lokalisasi adalah RT dan RW di Kelurahan Putat Jaya, pihak LSM, pemilik wisma, mucikari, calo, dan masyarakat terdampak. Kepentingan ini sebagai artikulasi akan keuntungan ekonomi, meningkatkan penyebaran penyakit kelamin, sumber pendapatan, dan tidak nyaman dengan keputusan hingga proses penanganan pasca penutupan lokalisasi.

Walaupun pada akhirnya semua pihak berkepentingan harus sepakat dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup Lokalisasi Dolly-Jarak karena kewenangan Pemerintah Kota Surabaya lebih besar dari kepentingan di atas. Poros yang digunakan dalam penutupan lokalisasi dan pemetaan kepentingan di dalamnya adalah perempuan PSK. Perempuan PSK dijadikan arena perebutan kekuasaan dan kepentingan untuk menjalankan fungsi negara yang bersifat maskulin.

Perempuan PSK tidak bisa mengartikulasikan kepentingannya karena hanya negara dan laki-laki yang dianggap bisa mengartikulasi kepentingan perempuan PSK dengan cara mengeksploitasi tubuhnya. Padahal apabila kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak bias gender, maka keadilan yang ditujukan untuk perempuan PSK bisa tercapai. Mereka lepas dari eksploitasi otonomi tubuhnya dan keluar dari jerat kekerasan gender dengan jalan duduk bersama merencanakan dan dilibatkan secara aktif sebagai subyek mandiri oleh Pemerintah Kota Surabaya.

- Sikap dari Pemerintah Kota Surabaya dituangkan dalam serangkaian proses persiapan sebelum hingga setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Segala bentuk program dijalankan dengan salah satu tujuannya yakni perempuan PSK bisa beralihprofesi dan keluar dari jerat prostitusi. Namun perempuan PSK yang masih dijadikan arena kepentingan berbagai pihak tidak bisa dengan mudah dikeluarkan. Pemberian bantuan stimulan dan pembekalan *soft skill* yang

disediakan belum mampu menyerap seluruh kebutuhan akan otonomnya tubuh perempuan PSK. Hal ini disebabkan karena prostitusi begitu multidimensi dan harus diselesaikan akar permasalahannya atau dipotong mata rantainya. Sehingga sikap atau tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang harusnya dilakukan adalah memberikan jaminan kehidupan perempuan PSK yang bebas dari eksploitasi akan kepentingan pihak tertentu.

#### **IV.2. Saran**

Peneliti memiliki saran dalam akhir penyusunan laporan skripsi ini antara lain:

- **Saran Untuk Akademisi**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai studi gender dan feminis, khususnya dalam pembahasan ketidakadilan dan kekerasan gender. Ketidakadilan dan kekerasan gender muncul dalam lingkungan lokalisasi prostitusi karena perempuan PSK tidak bisa membebaskan tubuhnya sendiri dari kepentingan eksploitasi pihak lain. Melihat kepentingan yang muncul dalam lokalisasi berdasarkan studi gender dan feminis diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atas eksploitasi dan dapat dikembangkan terus secara luas.

- **Saran Untuk Praktisi**

Saran peneliti kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya adalah ikut bersama-sama untuk menemukan solusi dan berperan aktif dalam program tindak lanjut pasca penutupan. Pengawasan juga dapat dilakukan sebagai penunjang jalannya keputusan Pemerintah Kota Surabaya atas penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Kepentingan-kepentingan awal yang menunjukkan kebutuhan akan hasil yang didapatkan dari lokalisasi haruslah dirubah dengan kepentingan untuk membangun kesetaraan di dalam masyarakat. Fokus kepada kebutuhan perempuan PSK sebagai poros utama di lokalisasi juga harus diperhatikan sehingga mereka bisa terlepas dari belenggu eksploitasi dan menjadi perempuan yang mandiri dengan bantuan dan dorongan positif dari semua pihak.